



# LAPORAN FORUM KONSULTASI PELAYANAN PUBLIK

DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
TAHUN 2024

DINAS KESEHATAN  
MUSI BANYUASIN



DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



## DAFTAR ISI

SAMPUL .....	i
DAFTAR ISI .....	2
KATA PENGANTAR .....	3
BAB I PENDAHULUAN .....	4
1.1 Latar Belakang .....	4
1.2 Maksud dan Tujuan .....	4
1.3 Ruang Lingkup .....	5
BAB II METODOLOGI PELAKSANAAN FKP .....	6
2.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan .....	6
2.2 Penyelenggaraan dan Peserta FKP .....	6
2.3 Metode Pelaksanaan FKP .....	6
2.4 Susunan Acara FKP .....	6
BAB III HASIL PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PELAYANAN PUBLIK (FKP) .....	8
3.1 Identifikasi Masalah .....	8
3.2 Analisis Masalah .....	8
3.3 Rencana Aksi .....	9
BAB IV KESIMPULAN DAN PENUTUP .....	10
LAMPIRAN I DOKUMENTASI KEGIATAN	
LAMPIRAN II BERITA ACARA YANG DITANDATANGANI	
LAMPIRAN III SURAT UNDANGAN	
LAMPIRAN IV SALINAN DAFTAR HADIR	

## KATA PENGANTAR

Dalam pelaksanaan pelayanan publik harus berdasarkan Standar Pelayanan sebagai tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Pelayanan publik diatur dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, pengaturan ini dimaksud untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) terus mendorong instansi pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam peningkatan pelayanan publik. Untuk itu, setiap unit layanan diminta untuk mengadakan Forum Konsultasi Publik (FKP) guna perbaikan dan peningkatan pelayanan publik.

Kegiatan FKP diharapkan untuk mendapatkan keselarasan antara harapan masyarakat dan kemandirian penyelenggara pelayanan, selain FKP, untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik, instansi pemerintah dapat melakukan Survei Kepuasan Masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan



dr. H. Azmi Dariusmansyah  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP 197209282005021003

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin sebagai salah satu penyedia layanan publik Kabupaten Musi Banyuasin, maka perlu diselenggarakan Forum Konsultasi Pelayanan Publik (FKP). Kegiatan FKP ini melibatkan perwakilan dari BPJS Kab. Musi Banyuasin, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Muba, Satuan Lantas Polres Musi Banyuasin, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Muba, Dinas Sosial Kab. Muba, IDI, IBI, PPNI, PAFI, PDGI, PWI Muba, Masyarakat Penerima Layanan UHC, Pelaku Usaha P-IRT, Masyarakat Penerima Layanan SKKL.

Hasil Laporan Forum Konsultasi pelayanan publik ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

### **1.2 Maksud dan Tujuan**

Tujuan pelaksanaan Forum Konsultasi Pelayanan Publik (FKP) adalah untuk mengidentifikasi permasalahan yang menghambat bagi para pengguna layanan di Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin. Adapun sasaran dilakukannya FKP adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;

2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

### **1.3 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pelayanan publik di Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin mencakup berbagai aspek penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Beberapa layanan yang biasanya disediakan antara lain :

1. Pelayanan Kesehatan Rujukan : Koordinasi dengan rumah sakit untuk penanganan kasus yang memerlukan perawatan lebih lanjut. Dalam hal ini ada 2 jenis produk layanan yakni rekomendasi Surat Kecelakaan Lalu Lintas dan UHC BPJS.
2. Pelayanan Kesehatan Lingkungan : Pengawasan terhadap sanitasi, kualitas air dengan mengeluarkan Surat Rekomendasi Air DAM (Depot Air Minum) dan Izin Produk Industri Rumah Tangga (PIRT).
3. Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan : Manajemen tenaga kesehatan seperti Surat Izin Belajar, Surat Izin Profesi, dan Surat Izin Praktik.

Melalui berbagai layanan ini, Dinas Kesehatan berupaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mendukung program pembangunan daerah.

## **BAB II**

### **METODOLOGI PELAKSANAAN FKP**

#### **2.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

Waktu pelaksanaan Kegiatan FKP ini telah dilaksanakan pada tanggal 23 September 2024 dimulai pukul 08.30 WIB s.d Selesai. Adapun tempat pelaksanaan FKP ini bertempat di Ruang Rapat I Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.

#### **2.2 Penyelenggaraan dan Peserta FKP**

Pelaksanaan Kegiatan FKP ini diinisiasi oleh jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin. Berpedoman pada PERMENPAN Nomor 16 tahun 2017 yang berisikan bahwa untuk unit penyelenggara pelayanan publik diwajibkan mengadakan Forum Konsultasi Pelayanan Publik minimal sekali dalam 1 tahun. Adapun peserta kegiatan FKP ini melibatkan banyak pihak dan lintas sektoral antara lain BPJS Kab. Muba, DPMPTSP Kab. Muba, Satlantas Polres Muba, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Muba, Dinas Sosial Kab. Muba, IDI, IBI, PPNI, PAFI, PDGI, Masyarakat Penerima Layanan SKKL/UHC, Masyarakat Penerima Layanan PIRT/Pelaku Usaha P-IRT, dan perwakilan PWI Kab. Muba.

#### **2.3 Metode Pelaksanaan FKP**

Pada kegiatan FKP ini dilakukan dalam bentuk diskusi dua arah guna mengetahui serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang mengalami kesulitan/hambatan dalam proses layanan di Dinas Kesehatan. Pada akhir kegiatan dilakukan kesepakatan terkait hal - hal yang perlu dilakukan perbaikan/peningkatan bagi pihak - pihak yang terlibat pada kegiatan FKP tersebut.

#### **2.4 Susunan Acara FKP**

<b>Hari/Tanggal</b>	<b>Waktu</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>PIC</b>
Senin, 23 September 2024	09:00 - 09:05 WIB	Pembukaan	Mc
	09.05 - 09.10 WIB	Do'a	Panitia
	09.10 - 09.20 WIB	Laporan Ketua Pelaksana	Sekretaris/Kasubbag
	09.20 - 09.30 WIB	Kata Sambutan Kepala Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan/Diwakilkan
	09:30 -11:30 WIB	Diskusi dan tanya jawab: <ul style="list-style-type: none"><li>● Masyarakat Pengguna UHC-BPJS/SKKL/P-IRT</li></ul>	Pemimpin Forum

		<ul style="list-style-type: none"> <li>● DPM-PTSP (Perizinan/Non Perizinan)</li> <li>● Disdukcapil</li> <li>● Dinsos</li> <li>● BPJS</li> <li>● Satlantas Polres</li> <li>● Profesi</li> <li>● Masyarakat</li> </ul>	
	11:30 - 12:00 WIB	Kesimpulan/Penutup	Pimpinan Forum/Mc

## BAB III

### HASIL PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PELAYANAN PUBLIK (FKP)

#### 1.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik yang dilakukan dengan Tatap Muka melalui Rapat Bersama antara penyelenggara layanan publik dengan publik diperoleh masukan, aspirasi bahkan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat melalui dialog dan diskusi tersebut. Adapun masukan, aspirasi dan keluhan yang disampaikan oleh publik antara lain mencakup persoalan perizinan PIRT, Peralihan BPJS Mandiri ke UHC, Penunggakan pembayaran BPJS, sampai persoalan Rekomendasi Surat Keterangan Kecelakaan Lalu Lintas.

#### 1.2 Analisis Masalah

No.	Produk Layanan	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan
1.	Rekomendasi (Surat Keterangan Kecelakaan Lalu Lintas) SKKL	Perawatan lanjutan pasien SKKL yang menunggu rujukan, karena kendala kamar rawat inap. Sebelum di rujuk pihak RS menyarankan untuk dirawat di fasilitas kesehatan terdekat selagi menunggu koordinasi dengan PIC dari Rumah Sakit rujukan.	Mengefisienkan waktu pelayanan rekomendasi SKKL dari 48 Menit bisa dipangkas menjadi 15 menit
2.	Peralihan/Perpindahan Kepesertaan UHC BPJS	Masih ada suku anak dalam dan kelompok marginal yang belum diikuti sertakan kepesertaan UHC BPJS	Dinas Kesehatan bersama Disdukcapil dan Dinas Sosial akan melakukan pendampingan pengawalan langsung dengan masyarakat suku anak dalam dan disabilitas, agar dapat langsung di link-kan kepesertaan BPJS-nya. Terkait kekurangan pelayanan, BPJS kesehatan sudah menyediakan saluran pengaduan/permintaan informasi terkait pelayanan BPJS Kesehatan guna memperbaiki pelayanan dari BPJS kesehatan kedepannya bagi masyarakat.
3.	Perizinan PIRT	1. Tidak terkoordinasi pengguna usaha sehingga banyak produk yang di kemasannya tidak ada nomor IRTP. 2. Pengguna layanan PIRT yang datang ke DPM-PTSP masih ada yang belum ada sertifikat pelatihan PIRT	Dinas Kesehatan bersama DPM-PTSP dan Disdagperin akan melakukan pendataan pelaku industri rumah tangga yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin agar terkoordinasi bagi produk usaha yang belum ada nomor IRTP di belakang kemasannya.

--	--	--	--

### 1.3 Rencana Aksi

- ◊ Kegiatan Forum Konsultasi Publik perlu diadakan secara berkelanjutan untuk perbaikan Standar Pelayanan Publik dengan semakin meningkatnya jumlah layanan di Dinas Kesehatan. Evaluasi di level internal Dinas Kesehatan dilakukan agar pelaksanaan FKP kedepannya lebih baik dan lancar.
- ◊ Dinas Kesehatan akan melakukan koordinasi bersama Disdukcapil dan Dinsos guna mendata anak suku dalam dan disabilitas agar langsung ter-link langsung kepesertaan BPJS-nya.
- ◊ Dinas Kesehatan bersama DPM-PTSP dan Disdagperin akan melakukan pendataan pelaku industri rumah tangga yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin agar terkoordinasi bagi produk usaha yang belum ada nomor IRTP di belakang kemasannya.
- ◊ Menetapkan waktu pelayanan yang lebih efisien lagi pada produk layanan surat rekomendasi SKKL agar proses pelayanan tidak memakan waktu bagi pengguna layanan.
- ◊ Melakukan pengkajian ulang terhadap standar pelayanan publik pada produk layanan di Dinas Kesehatan dan menambahkan pelayanan PIRT pada standar layanan yang baru.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN PENUTUP**

Dari hasil Forum Konsultasi Publik yang telah diselenggarakan dapat dihasilkan rekomendasi sebagai berikut :

1. Dengan adanya forum konsultasi publik ini bisa menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan, sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.
2. Dari penyelenggaraan FKP ini, diperoleh masukan bagi rumah sakit untuk dapat meningkatkan layanan publik baik dari segi produk maupun kualitas layanan.
3. Masyarakat pada prinsipnya ingin mendapatkan layanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara, serta memperoleh fasilitas yang nyaman dalam hal pelayanan.
4. Dinas Kesehatan agar bisa segera menindaklanjuti setiap permasalahan yang dihadapi sesuai dengan harapan masyarakat.
5. Dinas Kesehatan akan melakukan perbaikan mutu layanan melalui inovasi untuk mempermudah proses layanan dan meningkatkan kualitas layanan lebih baik lagi.
6. Rencana aksi yang dihasilkan dari Forum Konsultasi Publik ini dapat membantu pihak Dinas Kesehatan maupun Stakeholder terkait dalam memberikan pelayanan kesehatan secara paripurna.
7. Partisipasi masyarakat dan dukungan dari semua stakeholder sangat diperlukan agar Forum Konsultasi Publik dapat terus menjadi kegiatan yang berkelanjutan.

Sekayu, 25 September 2024  
Kepala Dinas Kesehatan



dr. H. Azmi Dariusmansyah  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP 197209282005021003

**DOKUMENTASI KEGIATAN FORUM KONSULTASI PELAYANAN PUBLIK  
DINAS KESEHATAN  
SENIN, 23 SEPTEMBER 2024**



**Sambutan Kepala Dinas Kesehatan**



**Paparan Kasubbag Hukum, Kepegawaian dan Umum**



**Masyarakat Pengguna Layanan SKKL**



**Masyarakat Pengguna Layanan SKKL**



**Polres Muba**



**Masyarakat Pengguna UHC BPJS**



**BPJS Kab. Muba**



**Masyarakat Pengguna Layanan P-IRT**



**DPM-PTSP**



**Ketua IDI**



**Kabid Pelayanan Kesehatan**



**Ketua PPNI**



**Foto Bersama Forum Konsultasi Pelayanan Publik**



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**DINAS KESEHATAN**

Jalan Kolonel Wahid Udin No. 230. Kabupaten Musi Banyuasin  
Telepon (0714)-321047, Faksimaile 0714-321918 Kode Pos 30711  
Email: [dinkeskabmuba@gmail.com](mailto:dinkeskabmuba@gmail.com). Website : [dinkes.mubakab.go.id](http://dinkes.mubakab.go.id)

**BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)**  
**PELAYANAN PUBLIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Pada hari ini, Senin Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Pelayanan Publik di Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut :

No	Produk Layanan	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	Rekomendasi SKKL	Perawatan lanjutan pasien SKKL yang menunggu rujukan, karena kendala kamar rawat inap.	Melakukan efisien waktu pelayanan di standar pelayanan produk layanan Rekomendasi SKKL	1 Minggu
2.	Perizinan P-IRT	<ul style="list-style-type: none"><li>● Pemohon atau pengguna layanan yang mengurus perizinan P-IRT yang mengajukan penomoran IRTP sebagian belum ada sertifikat pelatihan, ketika pengguna layanan tidak ada sertifikat maka DPM-PTSP akan mengarahkan pengguna layanan untuk mengikuti pelatihan ke Dinas Kesehatan sebagai penyedia sertifikat.</li><li>● Sering tidak terorganisasi pengguna usaha sehingga banyak produk yang di kemasannya tidak ada nomor IRTP.</li></ul>	Prosedur Perizinan P-IRT diditambahkan ke dalam Standar Pelayanan Produk Layanan Dinas Kesehatan.	1 Minggu
3..	Peralihan/Perpindahan Kepesertaan UHC BPJS	Masih ada suku anak dalam dan kelompok marginal yang belum diikuti sertakan kepesertaan UHC BPJS	Dinas Kesehatan bersama Disdukcapil dan Dinas Sosial akan melakukan pendampingan pengawasan langsung dengan masyarakat suku anak dalam dan disabilitas, agar dapat langsung di link-kan	Waktu tentatif menyesuaikan

			<p>kepesertaan BPJS-nya. Terkait kekurangan pelayanan, BPJS kesehatan sudah menyediakan saluran pengaduan/permintaan informasi terkait pelayanan BPJS Kesehatan guna memperbaiki pelayanan dari BPJS kesehatan kedepannya bagi masyarakat.</p>	
--	--	--	--	--

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progres tindaklanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Sekayu, 25 September 2024  
Kepala Dinas Kesehatan



dr. H. Azmi Dariusmasyah  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP 197209282005021003



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**DINAS KESEHATAN**

Jalan Kolonel Wahid Udin No. 230 Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin  
Telepon (0714)-321047, Faksimile 0714-321918 Kode Pos 30711  
Email: [dinkeskabmuba@gmail.com](mailto:dinkeskabmuba@gmail.com). Website : [dinkes.mubakab.go.id](http://dinkes.mubakab.go.id)

---

Nomor : B-800/5665/KES/2024 Sekayu, 20 September 2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Hal : Undangan Forum Konsultasi Pelayanan Publik (FKP)

Yth. Daftar undangan terlampir

Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : B-000.8/157/X/2024 Perihal Laporan Forum Konsultasi Pelayanan Publik (FKP), Maka Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin akan melakukan Forum Konsultasi Pelayanan Publik (FKP).

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, kami mengundang saudara untuk hadir pada :

Hari / Tanggal : Senin, 23 September 2024  
Pukul : 08.30 WIB s.d selesai  
Tempat : Ruang Rapat 1 Dinas Kesehatan Kab. Musi Banyuasin  
Acara : Forum Konsultasi Pelayanan Publik (FKP)

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Kesehatan



dr.H. Azmi Dariusmansyah  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP 197209282005021003

Lampiran I

Nomor : B-800/5665/KES/2024  
Tanggal : Tanggal : 20 September 2024  
Perihal : Undangan Forum Konsultasi Pelayanan Publik

**DAFTAR BADAN/DINAS/LINTAS SEKTOR/MASYARAKAT  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

No	Instansi	Jumlah Peserta
1.	Kepala Bagian Organisasi Setda Muba	2 Orang
2.	BPJS Kab. Musi Banyuasin	1 Orang
3.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Muba	1 Orang
4.	Satlantas Polres Musi Banyuasin (Layanan SKKL)	1 Orang
5.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Muba (Layanan UHC)	1 Orang
6.	Dinas Sosial Kab. Musi Banyuasin (Layanan UHC)	1 Orang
7.	Ketua IDI	1 Orang
8.	Ketua IBI	1 Orang
9.	Ketua PPNI	1 Orang
10.	Ketua PAFI	1 Orang
11.	Ketua PDGI	1 Orang
12.	PWI Muba	2 Orang
13.	Masyarakat Penerima Layanan SKKL	2 Orang
14.	Masyarakat Penerima Layanan UHC/BPJS	2 Orang
15.	Masyarakat Penerima Layanan P-IRT	2 Orang

Kepala Dinas Kesehatan



dr.H. Azmi Dariusmasyah  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP 197209282005021003



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**DINAS KESEHATAN**

Jalan Kolonel Wahid Udin No. 230. Kabupaten Musi Banyuasin  
Telepon (0714)-321047, Faksimaile 0714-321918 Kode Pos 30711  
Email: [dinkesofficialmuba@gmail.com](mailto:dinkesofficialmuba@gmail.com) .Website : [dinkes.mubakab.go.id](http://dinkes.mubakab.go.id)

**DAFTAR HADIR RAPAT**

Hari : Senin  
Tanggal : 23 September 2024  
Tempat : Ruang Rapat 1 Dinas Kesehatan  
Pukul : 08.30 s/d selesai  
Kegiatan : Kegiatan Forum Konsultasi Pelayanan Publik

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	dr. Azmi Dariusmansyah	19720928 200502 1 003	Kadunker	
2	Jonadi, SKM., M.Kes	19760827 199603 1 003	sekdin	
3	Nurzahrawaty	19710318 199503 2 002	Kepala Bagian Organisasi Setda Muba	
4	Romy Hartono	0916	BPJS Kab. Muba	
5	Nelly Apriyanti, S.Kom.M.Si	19780402 200604 2 015	Kepala DPM-PTSP	
6	Harrey Arcady, ST	95010401	Satlantas palmer	
7	Zainal Abidin, S.P.M.Si	19770916 199503 1 005	Kepala Diklatcapil (Mewiduli)	
8	Mery Pelfri	19870727 201001 2 016	Kasubag Hku kepala Dinkes	
9	Ichsan Nur Hamdan	19831009 200902 1 002	Ketva ID1	
10	HISWAYATI		Ketva IB1	
11	Nor Anchi		Ketva PPA1	
12			Ketva PAF1	
13	Agustiani Alpinah	19880901 201012 2 001	Ketva PDG1	
14				
15	Peng			
16				

17	Ho Siti Khasjatu	19730427 200701 2005	PFF Disn	
18	Wabila	-	Dinasos	
19	ROMAUZAH	Ayah (LIRIA)	Bongkaya STEKL	
20	Penhi	Ibu Yoga Sidiwan	Pengguna STEKL	
21	Fitri Aayami	198211112004212007	Adminiter	
22	cici Dinase		IBI	
23	M. Riko Adi Syahputra		Sekotana Labusda	
24	IRWINA SAPITRI		UMKM	
25	Masdarina	19811219 200801 2002	PI-program IRTP	
26	Suyanto	82050275	SAT lompat	
27	Holipah Muis		UMKM	
28	KURNIASARI	19730205 200801 2 002	DINKES (SDME)	
29	GUSTINASARI		DINKES (SDME)	
30	Yethria. SKM.M.Si	19840425 200012 2 001	Kabid yankes.	
31	Mandiana	19731021 200604 0 005	Adminiter	
32	Heruna	19850919 2010 01 2019	staf	
33	Nurzahrawaty	197103181995032002	Kabag organisasi	
32	Rendy	00570	PPDS kab Musi	
33	Suarmanto		staf	
34	Gusmika			
35	Abdul Rohim			
36	Rendi Aayami			
37	Zalqa F.			
38	Kindriant			
39	Arie Effyanti			
40	Npm lestari			